

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisasmita Rahardjo, 2006, *Pembangunan pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Anom Surya Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bambang Suggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bugin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Jakarta:PT.Rhineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Malang Universitas Brawijaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya.
- Suparji, 2019, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, Jakarta: UAI Press.
- Wirdanegsih, 2018, *Kearifan Lokal Minangkabau*, Yogyakarta: Deepublish.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta:Penerbit Grasindo.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Bersama.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.



Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Peraturan Nagari Cupak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari.

### C. Jurnal

Aldyan Hutanggalung, 2020, "*Mekanisme Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Menurut Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa*", Volume 1, Nomor. 1.

Desna Aromatic, Hendri, Nila Wahyuni, 2021, "*Menggagas Model Strategi Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)*", Volume 5, Nomor. 2.

Dwiana Putri, 2015, "*Peranan Pemerintah Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota*", Volume 2, Nomor. 1.

Harisnawati, Sri Rahayu, Intan Sri Wahyuni, 2018, "*Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah* ", Volume 7, Nomor. 2.

Hendri Andi Mesta dan Yolanda Fitri Satria, 2018, "*Penguatan badan Usaha Milik Nagari Pekandangan Emas Kecamatan Enam Lingkung Sumatera Barat*", Volume 1, Edisi 01.

Ibnu Supriyandi, 2021, "*Strategi Pengembangan BUMDes Sebagai Pilar Ekonomi Desa*", Volume 4, Nomor. 2.

Inten Kinasih, 2020, "*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat* ", Volume 1, Nomor. 1.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, *"Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"*, Volume 7, Edisi 01.

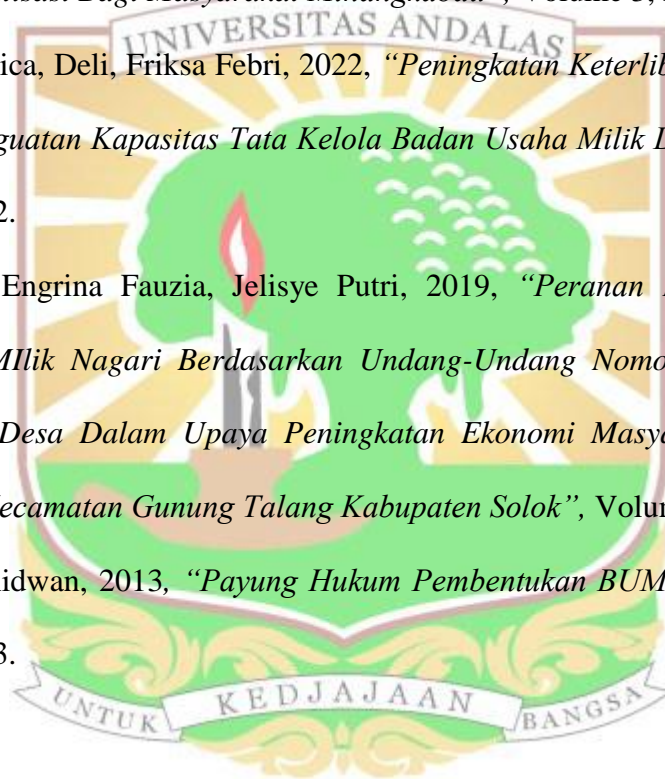
Ramadhania, 2019, *"Mengoptimalkan Peranan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Kenagarian Barung-Barung Balantai Tengah"*, Volume 2, Nomor. 2.

Rusyda Fauzana, 2014, *"Makna Nagari sebagai Representasi Sistem Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau"*, Volume 3, Nomor. 2.

Shanti Veronica, Deli, Friksa Febri, 2022, *"Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa"*, Volume 6, Nomor. 2.

Yulia Risa, Engrina Fauzia, Jelisyse Putri, 2019, *"Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok"*, Volume 4, Nomor. 2.

Zulkarnain Ridwan, 2013, *"Payung Hukum Pembentukan BUMDes"*, Volume 7, Nomor. 3.



## **E. Internet**

Acep Sopandi, 2021, "Strategi Pengembangan BUMDes Bersama",  
<https://akademidesa.id/2021/08/14/strategi-pengembangan-bum-des-bersama/>

Agusmardi, 2021, "Direktur NDC Unand, BUMNag Berperan Selamatkan Perekonomian Nagari Akibat Covid 19",

<https://jurnalsumbar.com/2021/07/direktur-ndc-unand-bumnag-berperan-selamatkan-perekonomian-Nagari-akibat-covid-19/>

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan”, <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/SinkronisasiHarmonisasi/>

Billy, 2018, ”Terdepan BUMNag Cupak Kabupaten Solok Bangun Nagari Berbasis Digital”, <https://suaraindependentnews.id/terdepan-BUMNagcupak-kab-solok-bangunnagari-berbasis-digital/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [https://kbbi.web.id/Kamus Besar Bahasa Indonesia versi \*online\*.](https://kbbi.web.id/Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20versi%20online)

Kementerian Desa, 2022, “BUMDES “, <https://bumdes.kemendes.go.id>.

Kementrian Keuangan Republik Indoensia, 2020, “Menggali Potensi BUMNAG Dalam Rangka Meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol, Dan Manfaat Bagi Nagari”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/padang/id/datapublikasi//berita/terbaru/menggali-potensi-bumnang-dalam-rangkameningkatkan-aksespartisipasi-kontrol-dan-manfaat-bagi-Nagari/>

Yuli Asmara Triputra, 2018, “Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, <https://stihpada.ac.id//Harmonisasi-peraturan-daerah-terhadap-peraturan-perundang-undangan-dalam-bingkai-republik-Indonesia/>